

**Judul: Faktualitas Berita Dalam Laporan Utama di Majalah Berita Mingguan
“Tempo”**

**(Studi Analisi Isi Faktualitas Berita Dalam Laporan Utama Majalah Tempo
Periode 1 Mei – 31 Juli 2010)**

A. Latar Belakang:

Mengabarkan sebuah informasi yang benar mengenai sebuah isu publik merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kalangan wartawan. Pemberian informasi yang benar dan akurat tersebut dipandang sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar (*right to know*). Menurut Ashadi Siregar, permasalahan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah permasalahan yang berhubungan dengan negara dimana tanggapan dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar kehidupan publik¹.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan wartawan dalam proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa fakta yang sengaja dirahasiakan demi kepentingan segelintir orang. Untuk kasus semacam ini diperlukan sebuah teknik khusus yang disebut dengan teknik investigasi. Jenis berita investigasi telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkenalkan oleh koran Indonesia Raya pada rentang waktu 1949

¹Masduki. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta. UII Pers: 2005. Halaman 7.

hingga 1958 dan 1971 hingga 1974². Adalah seorang Mochtar Lubis yang berada dibalik munculnya laporan investigasi dalam sebuah surat kabar harian di Indonesia. Melihat banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam pemerintahan di Indonesia, Mohtar Lubis tergerak untuk membuat sebuah laporan berita yang dapat dijadikan sebagai kritik kepada pemerintah dan juga membukakan mata masyarakat atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Sebagai contohnya adalah laporan investigasi tentang skandal korupsi yang ada didalam tubuh Pertamina. Dalam laporan berita yang dipublikasikan pada awal tahun 1970-an tersebut Indonesia Raya mengungkap penjualan minyak secara gelap yang dilakukan direksi Pertamina dengan pihak konglomerasi Nugra Santana asal Jepang berpotensi merugikan negara dengan nominal yang mencapai satu setengah juta dolar Amerika. Sebuah angka yang sangat besar jika dibandingkan nilai nominal rupiah yang berlaku saat ini karena pada saat itu kurs mata uang dolar Amerika Serikat hanya berada di kisaran empat ratus rupiah per dolarnya. Hasil dari laporan investigasi tersebut adalah dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Menteri Keuangan oleh Soeharto presiden Republik Indonesia yang berkuasa saat itu guna membatasi ruang gerak Pertamina agar laporan keuangan perusahaan tambang milik negara tersebut lebih jelas.³

² Santana K, Septiawan. *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia: 2003. Halaman: 9

³ <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/11/10/INT/mbm.19981110.INT97104.id.html> .
Rabu 15-09-2010. 13:10

Jurnalisme investigasi di Indonesia memasuki masa suram akibat meletusnya peristiwa kerusuhan malapetaka lima belas Januari atau lebih dikenal dengan nama peristiwa malari. Sebanyak 12 media cetak dianggap menjadi penyebab kerusuhan yang dianggap membahayakan stabilitas nasional. Dengan pemberitaan yang berlebihan yang mengajak untuk bersikap anti terhadap Jepang menjadikan media sebagai sasaran utama pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa malari⁴. Dari keduabelas media tersebut terselip nama Indonesia Raya media cetak yang berhasil mengungkap skandal korupsi di tubuh Pertamina. Gaya tulisan investigasi yang diusung Indonesia Raya dianggap dapat memprovokasi masyarakat dan mengusik kewibawaan pemerintah.

Salah satu contoh dari akibat pemberitaan investigasi adalah peristiwa tergulingnya presiden Richard Nixon dalam skandal *watergate* yang berhasil diungkap oleh dua wartawan *Washington Post*, Bob Woodward dan Carl Bernstein. Contoh itu menjadikan jurnalisme investigasi sebuah ancaman bagi pemerintahan yang diliputi banyak penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mencegah agar apa yang terjadi di Amerika agar tidak menular ke Indonesia, maka tipe peliputan investigasi tidak boleh dilakukan dalam dunia pers di Indonesia⁵.

Tidak hanya jurnalisme investigasi yang memasuki masa suram pasca peristiwa malari. Pasca peristiwa malari secara umum membuat pers di Indonesia

⁴ <http://www.detiknews.com/read/2009/01/15/080030/1068638/10/soeharto-tutup!-tutup!-tutup!>. Rabu 15-9-2010. 13.35

⁵ Santana K, Septiawan. *op. cit.* Halaman 13

menjadi terbelenggu. Pemerintahan orde baru yang banyak menyalahgunakan wewenang membatasi ruang gerak pers dengan peraturan yang sangat ketat. Tujuan dari hal tersebut ialah agar pers tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai informasi publik menjadi terancam.

Pada masa Orde Baru ini, almarhum Mochtar Lubis beranggapan pers di Indonesia telah membohongi masyarakat karena hanya memberitakan apa yang diinginkan oleh pemerintah sehingga hanya berfungsi sebagai alat bicara pemerintah. Tidak adanya kritik dari pers kepada pemerintah menjadi indikasi dari kondisi pers yang tidak bebas⁶. Ancaman pembredelan selalu membayangi sebuah perusahaan pers jika berita yang dipublikasikan dianggap merugikan pemerintah.

Pers Indonesia memasuki babak baru setelah era orde baru berakhir. Mundurnya presiden Soeharto dan juga dihapusnya Departemen Penerangan sebagai lembaga pengawas pers menjadi simbol dimulainya era kebebasan pers di Indonesia. Longgarnya pengawasan terhadap pers dimanfaatkan oleh para wartawan untuk bersaing menghadirkan berita yang tercepat dan juga terbaik. Sisi baiknya adalah dengan banyaknya media yang ada masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi.

Namun sisi negatifnya adalah persaingan yang terjadi dalam industri media yang berakibat pada cara media yang untuk mendapatkan informasi. Baik

⁶Santana K, Septiawan. op. cit. Halaman: 14

menggunakan cara yang benar atau pun sebuah jalan singkat hanya wartawan yang menulis berita itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini kemudian membuat kebebasan pers disalah artikan oleh wartawan menjadi pers yang bebas. Akibatnya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar menjadi terancam.

Momen kebebasan pers setelah orde baru tumbang juga menjadi momen mulai tumbuhnya kembali jurnalistik investigasi di Indonesia. Jurnalisme investigasi yang dilarang pada saat orde baru perlahan mulai muncul lagi sebagai pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Yang paling banyak adalah berita investasi dengan topik hiburan yang memiliki resiko pemberitaan kecil dan juga biaya yang lebih murah. Kehidupan pribadi artis merupakan sebuah komoditi yang menguntungkan dengan biaya produksi yang rendah. Berbeda dengan berita invesitigasi bidang politik yang memiliki tingkat resiko pemberitaan yang paling besar dan juga butuh banyak biaya, waktu dan tenaga dalam melakukan sebuah investigasi⁷.

Tidak banyak media yang memilih laporan investigasi sebagai sajian berita utama. Salah satu dari tidak banyak media itu adalah majalah berita mingguan Tempo. Dengan menyediakan satu rubrik khusus Laporan Utama dengan gaya

⁷ Santana K, Septiawan. *op. cit.* Halaman: 13

penulisan investigasi, Tempo secara kontiniu mencoba untuk memberikan sebuah informasi yang berbeda dibandingkan dengan media massa lainnya⁸.

Pilihan menjadikan investigasi sebagai laporan utama membuat Tempo beberapa kali harus mendapatkan pelaporan dari obyek berita kepada Dewan Pers atau pun pihak kepolisian. Kebanyakan dari tuntutan yang ditujukan kepada Tempo umumnya berkaitan dengan pencemaran nama baik. Setidaknya terdapat empat pemberitaan yang mengakibatkan Tempo mendapatkan pengaduan ke Dewan Pers dan pihak kepolisian pada masa setelah era reformasi.

Yang pertama dari keempat kasus itu adalah berita dalam rubrik Laporan Utama dengan judul “Ada Tomy di Tanah Abang” berita yang mengungkap keterlibatan pengusaha Tomy Winata dalam kasus kebakaran pasar Tanah Abang. Kasus Tempo dengan Tomy Winata ini merupakan kasus yang paling menyedot perhatian publik karena juga diwarnai dengan penyerbuan kantor Tempo oleh pendukung Tomy Winata⁹.

Yang kedua adalah pemberitaan tentang Pemuda Panca Marga (PPM) dalam peristiwa penyerbuan terhadap kantor KONTRAS dalam artikel yang berjudul “*Kala Tentara Swasta Bergerak*”. Pemilihan kata yang dianggap berkonotasi negatif

⁸ *Ibid* . Halaman: 1

⁹ <http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/171.php>. Rabu 15-9-2010. 14.20

membuat PPM melakukan gugatan Tempo kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik¹⁰.

Ketiga, pemberitaan mengenai kasus pajak Sukanto Tanton pemilik grup Asian Agri. Dalam laporan utama edisi 15-21 Januari 2007 yang berjudul “*Akrobat Pajak*”, Tempo mengungkapkan bahwa grup Asian Agri telah melakukan penggelapan pajak yang jumlahnya cukup besar yang berpotensi merugikan negara hingga satu trilyun rupiah¹¹.

Yang keempat, pemberitaan mengenai kegagalan kebijakan pemerintah terkait dengan kisruh saham keluarga Bakrie dalam artikel yang berjudul “*Siapa Peduli Bakrie*”. Dalam Laporan Utama edisi minggu keempat November 2008 tersebut majalah Tempo menganggap bahwa kebijakan pemerintah membekukan penjualan saham grup Bakrie erat hubungannya dengan “balas jasa” kalangan istana Negara atas dukungan Bakrie dalam kemenangan pemilu 2004. Akibat dari dua berita utama tersebut Tempo mendapatkan tuntutan dengan pasal yang sama, yaitu pencemaran nama baik.

Selain keempat kasus tersebut sebenarnya ada lagi kasus yang menimpa majalah berita mingguan Tempo. Terdapat dua kasus yang menimpa majalah Tempo terkait dengan dua edisinya. Pertama adalah kasus yang berujung pada pembredelan

¹⁰ <http://www.tempointeractive.com/hg/hukum/2004/10/05/brk,20041005-05,id.html>. Rabu 15-9-2010. 15.30

¹¹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2007/01/15/krn.20070115.91802.id.html>. Rabu 15-9-2010. 17.35

majalah Tempo yang terjadi pada tanggal 21 Juni 1994. Pembredelan tersebut disinyalir erat kaitannya dengan pemberitaan mengenai pembelian kapal perang bekas Jerman oleh Menristek saat itu B.J. Habibie. Soeharto, presiden yang berkuasa pada saat itu memerintahkan majalah Tempo untuk ditutup karena merasa dilangkahi atas informasi pembelian kapal tersebut. Kasus ini tidak dimasukkan kedalam contoh kasus delik pers majalah Tempo karena kurun waktu yang ada dimasa orde baru, sedangkan penelitian ini hanya mengambil kurun waktu pada masa paska orde baru atau biasa disebut era reformasi.

Kasus yang kedua terkait dengan sampul edisi "*Perjamuan Terakhir*" yang memberitakan tentang hari terakhir kehidupan mantan presiden Soeharto. Dalam edisi itu majalah Tempo memuat sampul yang identik dengan karya Leonardo da Vinci yang melukiskan bagaimana suasana perjamuan Yesus Kristus atau Nabi Isa dengan pengikutnya sebagai simbol pengorbanan. Sementara dalam edisi majalah Tempo saat itu ilustrasi yang dimuat tokoh dalam perjamuan terakhir lukisan Leonardo da Vinci diganti dengan keluarga Cendana. Kontan saja apa yang dilakukan majalah Tempo mendapatkan protes dari umat kristiani seperti yang dilakukan oleh Forum Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI, Forum Masyarakat Katolik Indonesia, Solidaritas Masyarakat Katolik RI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik, Pemuda Katolik, serta Tim Pembela Kebebasan Beragama dan Wanita Katolik RI¹². Tetapi mengapa edisi ini tidak masuk kedalam delik pers? Alasannya karena majalah Tempo

¹² <http://www.overseasthinktankforindonesia.com/2008/02/06/majalah-tempo-dan-perjamuan-terakhirnya/comment-page-1/> Kamis, 20-5-2011. 13:25

bukan mendapatkan sebuah keberatan dari obyek berita dalam hal ini keluarga Cendana. Protes akibat pemberitaan ini berasal dari umat kristiani yang tersinggung dengan sampu majalah Tempo yang tidak memiliki hubungan dengan pemberitaan secara langsung.

Seringnya Tempo mendapatkan tuntutan akibat dari pemberitaan yang dipublikasikan menjadi sebuah pertanyaan yang muncul. Mengapa laporan investigasi sering mendapatkan pengaduan baik ke Dewan Pers atau pun pihak kepolisian? Jawabannya, menurut Septiawan K. Santana dalam bukunya *Jurnalisme Investigasi*, jika dikaitkan dengan etika dan hukum sebuah berita investigasi memiliki kecenderungan untuk melaporkan sebuah peristiwa tanpa didukung dengan fakta-fakta atau bukti dan juga pelanggaran faktual. Hal tersebut mengakibatkan jenis berita investigatif menjadi sangat rawan dengan pelaporan dengan tuduhan pencemaran nama baik¹³.

Sebagai majalah yang ingin menjadi “*clearing house of informations*” yang berarti sebagai penyedia informasi yang akurat, adil, dan tidak memihak, faktualitas berita menjadi sebuah syarat utama bagi majalah TEMPO¹⁴. Hal itu mengingat dengan mampu menjaga faktualitas sebuah berita maka informasi yang dihasilkan juga akan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

¹³Santana K, Septiawan. *op. cit.* Halaman: 322

¹⁴ Steele, Janet. *Wars Within*. Jakarta. PT Dian Rakyat. 2007. Halaman: xxxi

Keinginan majalah TEMPO ini juga sejalan dengan tujuan dari Goenawan Mohamad pendiri majalah TEMPO yang menginginkan majalah ini menjadi salah satu cara untuk mencari kebenaran ditengah masyarakat jika terjadi sebuah kekacauan informasi¹⁵. Alasan ini kembali mempertegas bahwa bagi majalah Tempo faktualitas berita merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan memuat fakta-fakta yang faktual dalam sebuah berita majalah TEMPO akan mampu menjaga kualitas beritanya. Dari fakta-fakta yang ditampilkan majalah berita mingguan Tempo, penelitian ini akan mampu menilai tingkat faktualitas majalah berita mingguan Tempo.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana faktualitas berita dalam Laporan Utama di Majalah Berita Mingguan TEMPO?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat faktualitas berita dalam Laporan Utama Majalah Berita Mingguan TEMPO.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi majalah berita mingguan Tempo khususnya terkait dengan faktualitas berita. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dengan topik yang serupa.

¹⁵ Septiawan. *op cit* . Halaman: 18

E. Kerangka Teori

E.1 Fakta Sebagai Dasar Faktualitas Berita

Sebuah fakta diperlukan dalam menulis sebuah berita. Fakta tersebut diperlukan agar suatu berita bisa disebut sebagai sebuah karya jurnalistik. Karya jurnalistik yang baik adalah sebuah karya yang bersifat faktual. Faktual memiliki arti bahwa sebuah fakta dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapa saja ditempat peristiwa itu terjadi¹⁶.

Terdapat dua jenis fakta berdasarkan arti yang dikandungnya¹⁷. Yang pertama adalah fakta ada. Yang dimaksud dengan fakta ada ialah fakta yang dapat dirasakan menggunakan panca indra manusia ketika terjadi suatu peristiwa. Dengan demikian untuk membuktikan kebenaran pada jenis fakta ini akan relatif lebih mudah karena dapat dibuktikan oleh siapa saja dengan menggunakan panca indra.

Sedangkan yang kedua adalah fakta yang dikonstruksikan oleh seseorang dan disampaikan kepada orang lain. Jenis fakta ini biasanya berupa pandangan seorang ahli dalam suatu bidang yang dijadikan sebagai narasumber untuk menilai sebuah peristiwa. Kebenaran dari fakta ini tergantung dari kejelian seorang wartawan dalam memilih narasumber. Kompetensi yang narasumber terhadap sebuah topik atau isu yang ditanyakan kepadanya mempengaruhi tingkat kebenaran dari fakta jenis ini.

¹⁶ Siregar, Ashadi. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 1998. Halaman 55

¹⁷ Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2009. Halaman: 76

Oleh karena alasan itu maka banyak berita jurnalistik lebih memilih fakta ada sebagai realitas yang pertama.

Faktualitas berita sendiri memiliki pengertian sebuah berita yang mengandung fakta-fakta yang benar-benar terjadi dan berita yang dibuat berdasar perasaan, penilaian, atau rekayasa manusia¹⁸. Kesesuaian yang ada antara kenyataan dan pernyataan dalam sebuah berita menjadi sebuah syarat yang harus dipenuhi agar faktualitas sebuah berita dapat tercapai. Intinya adalah kebenaran merupakan apa yang menjadi tujuan dari faktualitas berita. Dengan melaporkan peristiwa tepat sesuai dengan kejadian dilapangan maka pembaca dapat memahami kronologis sebuah peristiwa secara benar dan sistematis.

Kejelian seorang wartawan untuk mengidentifikasi fakta sangat diperlukan pada waktu mengumpulkan fakta dilapangan. Dengan jeli mengumpulkan fakta maka akan memudahkan saat penyusunan fakta-fakta menjadi satu kesatuan yang utuh ketika dirangkai menjadi sebuah berita. Cara mengidentifikasi fakta tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pertanyaan rumus dasar jurnalistik 5W+1H. Dengan adanya identifikasi fakta yang jelas tersebut akan lebih mudah membuat alur berita sehingga diperoleh sebuah pemahaman oleh pembaca yang baik atas sebuah peristiwa.

¹⁸ *Ibid. Halaman: 82*

Meskipun berhasil mendapatkan banyak fakta setelah melakukan pengidentifikasian, tidak lantas semua fakta-fakta tersebut dimasukan dalam sebuah laporan berita. Seorang wartawan harus bisa memilih fakta-fakta mana saja yang bisa dimasukan dan fakta-fakta mana saja yang tidak perlu dimasukan. Hal tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi kebingungan yang dialami pembaca jika seandainya saja terdapat fakta yang bertentangan satu sama lain. Kebingungan itu akan mengakibatkan pembaca dapat kurang mengerti apa yang menjadi maksud inii berita.

Pentingnya fakta yang akurat bagi faktualitas kemudian harus diikuti sikap yang menekan seminimal mungkin pencampuran opini dengan fakta yang mungkin saja muncul dari seorang wartawan. Dalam menulis berita terkadang seorang wartawan secara tidak sadar menggiring khalayak agar memiliki pemikiran yang sama dengan sikap pribadinya dalam menanggapi sebuah peristiwa. Ketidaksadaran itulah yang kemudian membuat fakta-fakta yang telah didapat agar bisa menjelaskan sebuah peristiwa seperti pada kejadian sesungguhnya menjadi bias.

Dengan mengesampingkan opini dan kritis terhadap fakta yang didapat maka seorang wartawan akan dapat merekonstruksi realitas seperti kejadian yang sebenarnya ketika terjadi ditempat kejadian. Dengan tercapainya hal itu maka akan tercapai sebuah keseuaian kenyataan dan pernyataan sehingga sebuah berita akan semakin mendekati kebenaran.

E.2 Pers dan Fungsinya di Dalam Masyarakat

Membicarakan faktualitas berita secara tidak langsung akan menyinggung fungsi pers. Mendapatkan informasi yang benar sebagai sebuah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh wartawan. Untuk menempuh itu, salah satu yang dapat dilakukan oleh wartawan adalah dengan menjaga faktualitas beritanya. Karena dengan menjaga faktualitasnya, sebuah media telah mampu menjaga kebenaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Sebagai makhluk sosial tentu saja seorang individu perlu untuk berkomunikasi untuk saling bertukar informasi dengan individu yang lain. Informasi merupakan sebuah kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dengan saling bertukar informasi maka seseorang akan dapat mengetahui kejadian-kejadian yang berada disekitarnya.

Pada dasarnya pers memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat menghambat arus informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Perbedaan jarak, ruang, dan waktu merupakan beberapa faktor penghambat tersebut. Oleh karena itu, pers dalam berbagai bentuknya baik cetak atau elektronik mencoba untuk mencoba untuk meminimalisir faktor penghambat yang ada agar arus informasi dapat segera sampai kepada masyarakat.

Lebih dalam lagi, mengenai fungsi pers ini Kusumaningrat dalam bukunya *Jurnalistik:Teori dan Praktik* membagi fungsi dari pers menjadi delapan. Kedelapan fungsi pers tersebut adalah¹⁹:

1. Informatif

Fungsi yang pertama ini merupakan fungsi pers yang paling dasar. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan pelaksanaan sebuah kewajiban yang harus dijalankan mengingat pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar merupakan sebuah hak dasar yang harus dipenuhi oleh pers. Semua peristiwa yang terjadi pada hari itu disampaikan pers melalui media-media yang ada baik cetak maupun elektronik.

2. Kontrol

Fungsi yang kedua menempatkan pers pada posisi untuk mengawasi jalannya sebuah pemerintahan. Pengawasan (watchdog) tersebut dilakukan agar tidak terjadi sebuah penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut dilakukan pada tingkatan legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Dalam sebuah negara demokrasi, pengawasan yang dilakukan oleh pers ini merupakan sebuah perwujudan dari asas demokrasi. Dalam menjalankan fungsi ini pers dituntut untuk lebih aktif dan kritis dalam melihat jalannya sebuah pemerintahan.

¹⁹Kusumaningrat. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung. PT. Rosda Karya: 2005. Halaman 27-29

Dengan begitu, pers dapat segera memberikan informasi kepada masyarakat jika terdapat sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan baik pada tingkatan legislative, yudikatif, maupun eksekutif.

3. Interpretatif dan Direktif

Pada fungsi yang ketiga ini pers memiliki tugas untuk menjelaskan secara jelas kepada masyarakat atas sebuah kejadian. Masyarakat tentunya terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, bukan tidak mungkin pemahaman antara individu yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang disebabkan tingkat pendidikan. Sebagai contohnya adalah pemberitaan mengenai penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Untuk beberapa kalangan dimasyarakat mungkin dapat memahami alasan mengapa penghapusan subsidi bahan bakar minyak dilakukan. Namun disisi lain ada juga masyarakat yang menolak penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Oleh sebab itu disinilah letak fungsi pers. Dengan melakukan sebuah interpretasi dan menjelaskan sebuah kejadian secara rinci maka perbedaan pendapat tersebut dapat disatukan dalam satu pemahaman. Setelah tahap intrepretasi dapat dilakukan dan masyarakat tahu mengenai duduk perkara suatu kejadian pers dapat memberikan sebuah panduan kepada masyarakat untuk menyikapi sebuah kejadian. Ketika telah mencapai tahap inilah pers menjalankan fungsi direktifnya.

4. Menghibur

Sebuah informasi tidak harus selalu berberbentuk kejadian yang berkaitan dengan berita politik, ekonomi, ataupun masalah-masalah sosial. Sebuah kisah yang menampilkan humor, sisi menarik dari kehidupan manusia, atau pun kehidupan para selebritas dapat menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi pembaca.

5. Regeneratif

Sejarah merupakan bagian dari informasi. Sejarah tersebut dapat berupa budaya sebuah masyarakat atau mengenai perjuangan sebuah bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Dengan mencatat dan mempublikasikan nilai-nilai budaya yang berlaku dan juga perkembangan suatu bangsa maka media menjalankan sebuah tugas regenerasi dengan menyampaikan sebuah warisan sosial kepada generasi yang lebih muda.

6. Pengawasan Hak-hak Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Baik itu kaum mayoritas maupun kaum minoritas. Dalam fungsi yang keenam ini pers berfungsi untuk menjaga supaya tidak terjadi sebuah dominasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas, atau pun juga sebaliknya sebuah tirani yang dilakukan oleh kaum minoritas. Oleh karena itu, pers harus mampu untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh kaum mayoritas maupun minoritas agar memperoleh hak yang seharusnya diperoleh dan juga kewajiban yang seharusnya dijalankan.

7. Ekonomi

Pers bisa menjadi sebuah etalase untuk menjual produk-produk hasil produksi. Melalui iklan yang dimuat dalam media massa sebuah perusahaan menjajakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaannya. Sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dapat dilakukan antara pengelola media dan juga sebuah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Bagi media iklan merupakan sumber dana untuk kelangsungan penerbitan, sedangkan bagi sebuah perusahaan media merupakan sebuah alat promosi yang paling efektif.

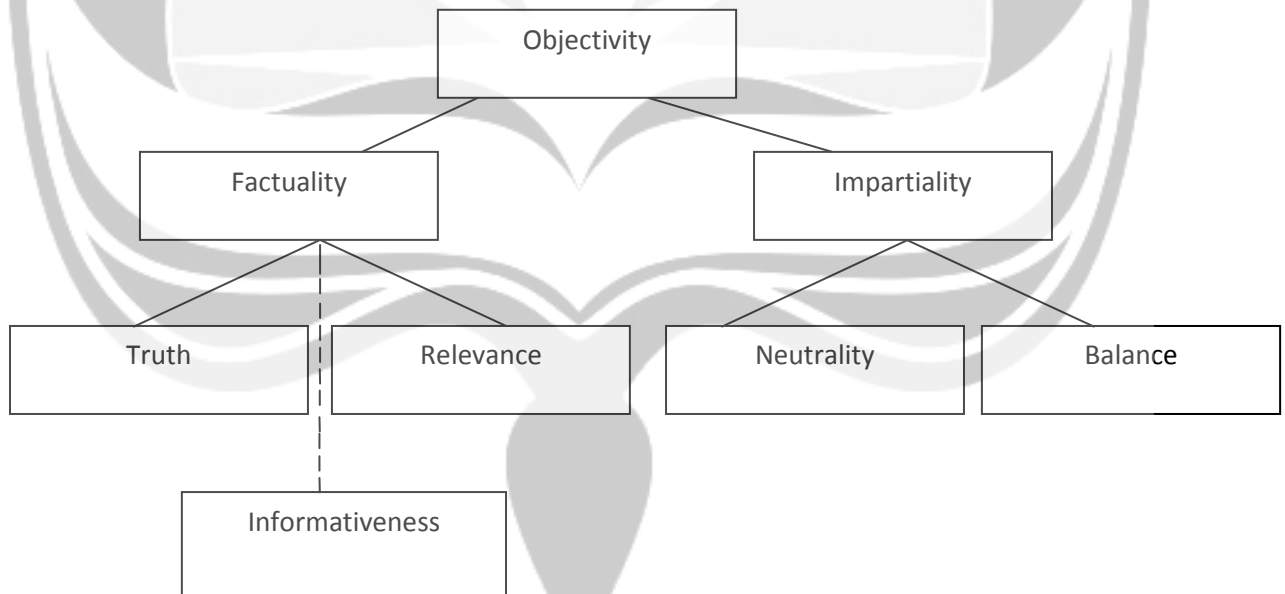
8. Swadaya

Dalam fungsinya yang terakhir, pers memiliki kewajiban untuk dapat menjaga kelangsungan penerbitannya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Dengan mampu menjaga kemandiriannya tersebut maka sebuah perusahaan pers mampu menjaga kebebasannya dalam memberitakan sebuah informasi kepada masyarakat tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun.

Kedelapan fungsi pers yang diperkenalkan oleh Kusumaningrat diatas menggambarkan bagaimana pentingnya media dalam menyediakan informasi sebagai pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Baik sebuah informasi yang berfungsi sebagai hiburan maupun informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik pers harus menjaga kebenaran informasi yang disampaikannya. Kebenaran sebuah informasi akan berpengaruh pada sikap dan juga pemahaman masyarakat dalam menghadapi sebuah peristiwa. Selain itu, mendapatkan sebuah informasi yang benar sesuai apa yang dibutuhkan merupakan hak dari masyarakat.

E.3 Kualitas Berita dan Obyektivitas

Menakar kualitas berita dapat dilakukan dengan melihat obyektivitas yang tampak dalam teks berita. Westerstahl memperkenalkan sebuah skema obyektivitas yang telah mencapai keseimbangan dari hasil dari penelitiannya terhadap lembaga penyiaran publik di Swedia yang tertuang dalam buku *Media Performance* karangan Denis McQuail²⁰. Terbagi menjadi empat kriteria Westerstahl mencoba untuk mempermudah mengukur obyektivitas. Keempat kriteria tersebut adalah kebenaran (*truth*), relevansi (*relevance*), keberimbangan (*balance*), dan netralitas (*neutrality*). Agar lebih dapat memahami bagaimana cara kerja obyektivitas yang diperkenalkan oleh Westerstahl dapat dilihat dalam skema dibawah ini²¹:



Gambar 1.1 Skema Obyektivitas Westerstahl

²⁰ Mc Quail, Denis. *Media Performance: Mass Communication and Public Interest*. London. SAGE Publication Ltd. 1992. Halaman: 196.

²¹ *Ibid.* Halaman: 196

Berdasarkan bagan diatas, Westerstahl membagi obyektivitas menjadi dua bagian, yakni faktualitas yang merupakan aspek kognitif dan imparsialitas yang merupakan aspek evaluatif. Aspek kognitif ini erat kaitannya dengan kualitas informasi atau yang biasa disebut dengan faktualitas yang ditampilkan dalam sebuah teks berita. Sedangkan aspek evaluatif lebih melihat obyektivitas dari keberpihakan media dalam pemberitaannya.

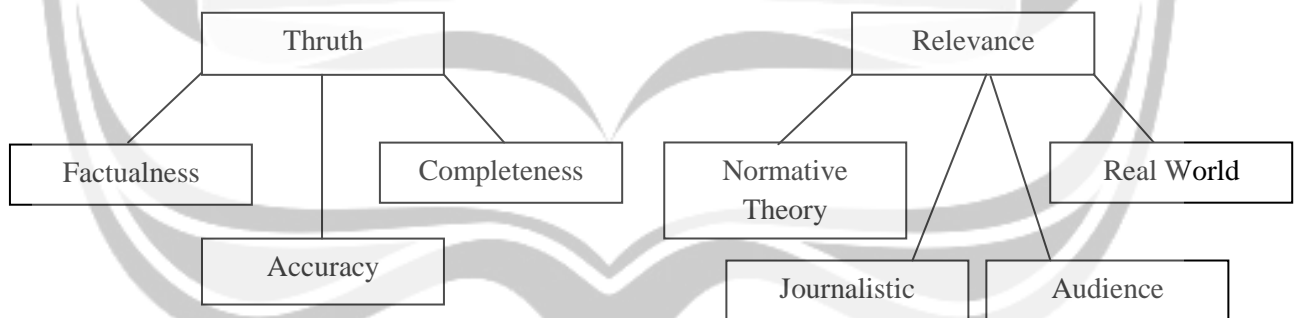
Faktualitas berita tersebut dapat dinilai dari tiga faktor. Faktor yang pertama adalah kebenaran (*truth*). Pada faktor yang pertama ini dalam penelitian tentang media massa melihat pada fakta-fakta yang ada dalam sebuah teks berita. Untuk lebih mudah mengidentifikasi fakta, kebenaran masih dibagi lagi menjad tiga turunan. Ketiga turunan itu adalah keselarasan dengan kenyataan (*factualness*) yang berfungsi untuk melihat ada tidaknya fakta yang tercampur dengan opini. Kedua adalah akurasi (*accuracy*), yang berfungsi untuk melihat ada tidaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jurnalis dalam menulis nama, ejaan, tanggal kejadian, atau tempat kejadian sebuah peristiwa. Terakhir adalah kelengkapan (*completeness*), yang berfungsi untuk melihat kelengkapan data dari sebuah berita. Kelengkapan unsur 5W+1H dapat dijadikan alat ukur lengkap atau tidaknya sebuah berita²².

Faktor kedua dari faktualitas adalah relevansi (*relevance*). Relevansi adalah proses seleksi yang dilakukan oleh seorang wartawan dalam tugas peliputan. Seleksi yang dilakukan ini berhubungan dengan keterkaitan peristiwa dengan nara sumber

²² *Ibid.* Halaman 197

atau fakta pendukung yang dipilih untuk menjelaskan suatu peristiwa. Kesesuaian judul, nara sumber, dan permasalahan yang digali akan membuat sebuah berita menjadi fokus. Sebuah berita yang fokus akan membantu pembaca mengerti dan memahami sebuah peristiwa. Faktor terakhir dari faktualitas adalah informatif (*informativeness*). Faktor ini berkaitan dengan banyak sedikitnya informasi yang diterima masyarakat dari media yang berakibat pada pemahaman terhadap suatu hal. Semakin banyak dan lengkap informasi yang diberikan oleh media, maka akan semakin mudah bagi pembaca untuk memahami sebuah peristiwa.

Lebih jelasnya dimensi dan kategori yang ada dalam faktualitas yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar seperti dibawah ini²³:



Gambar 1.2 Dimensi dan Kriteria Faktualitas

Aspek evaluatif berhubungan dengan imparialitas. Secara harafiah imparialitas dapat diartikan sebagai ketidak berpihakan media. Ketidak berpihakan media erat kaitannya dengan subyektifitas dan opini pribadi tentang sebuah peristiwa

²³ *Ibid.* Halaman 203.

yang diliput. dalam menulis sebuah berita ada kalanya seorang wartawan secara tidak sengaja memasukan sebuah opini pribadi yang dapat mengaburkan kebenaran informasi. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya seorang wartawan harus mampu membedakan dan memisahkan fakta dan opini.

Imparsialitas dinilai dari dua faktor. yang pertama adalah keseimbangan (*balance*). Keseimbangan dapat diartikan memberikan porsi yang sama baik berupa pendapat atau pun jumlah paragraf dalam sebuah pemberitaan. Sebagai contoh adalah jika terdapat dua pihak yang terlibat konflik media harus mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat yang tertuang dalam sebuah teks berita. Pemberian kesempatan yang sama dan juga pemberian akses yang sama dalam media merupakan syarat utama dalam sebuah keseimbangan. Jika kedua syarat atau salah satu syarat dari aspek keseimbangan tersebut tidak dapat terpenuhi maka sebuah media dapat dikatakan tidak berimbang dalam memberitakan sebuah peristiwa²⁴.

Faktor yang kedua dalam penilaian ketidak berpihakan adalah netralitas (*neutrality*). Batas antara keseimbangan dan netralitas sebenarnya sedikit sulit untuk dibedakan. Namun untuk aspek netralitas lebih melihat pada penggunaan kalimat yang tidak sensasional dan juga tidak berpotensi evaluatif. Tidak sensasional berarti dalam memilih kalimat sebuah media sebaiknya menghindari kata-kata yang melebih-lebihkan. Pemilihan kata yang melebih-lebihkan tersebut juga akan berakibat pada pemaknaan fakta yang berlebihan juga sehingga akan terjadi sebuah pemahaman

²⁴ *Ibid.* Halaman 201

yang salah. Tidak evaluatif berarti tidak menggunakan kalimat menyalahkan atau membenarkan pihak manapun. Karena dengan memilih suatu kalimat yang evaluatif akan menunjukkan bahwa sebuah media memberikan sebuah opini atas sebuah kejadian sehingga sangat mungkin terjadi pencampuran opini dan fakta berita²⁵.

F. Kerangka Konsep

Kebenaran informasi yang diberikan oleh majalah Tempo dapat dilihat dari teks berita yang diproduksi oleh majalah Tempo. Alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisa fakta-fakta dari teks berita tersebut adalah skema obyektivitas Westerstahl. Cara penilaian yang diperkenalkan oleh Westerstahl ini menjadi alat ukur yang tepat karena juga digunakan oleh Dewan Pers dalam memberikan penilaian pada pemberian penghargaan atas kualitas pemberitaan sebuah media cetak²⁶.

Agar lebih mempermudah lagi proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini, maka dibuatlah unit analisis data menjadi beberapa kategori agar diperoleh sebuah data yang spesifik. Karena penelitian ini akan melihat ada tidaknya pelanggaran faktual atas berita dalam rubrik Laporan Utama dalam majalah berita mingguan Tempo maka skema obyektivitas Westerstahl yang digunakan adalah hanya pada aspek kognitif pada bagian faktualitas (*factuality*). Lebih detinya tabel dibawah ini akan memuat kategori-kategori dari unit analisis dalam penelitian ini:

²⁵ *Ibid*

²⁶http://www.dewanpers.org/upload/buletin/f4465b7131f18a45ea71a198f826a3f3/attach/ETIKA_Edisi_Januari_2007.pdf . Kamis. 20-9-2010. 16:15

Dimensi		Unit Analisis	Kategorisasi	Sub Kategori
T R U T H	Factualness	a) Nilai Informasi	Kedalaman Informasi	a) Ada b) Tidak ada
		b) Readability	Ada atau tidak ada penggunaan kata atau istilah khusus yang membuat berita sulit dipahami	a) Ada b) Tidak Ada
		c) Checkability	Ada atau tidak ada sumber-sumber rujukan yang jelas	a) Ada b) Tidak ada
	Accuracy	Akurasi penyajian	Bersifat teknis, ada atau tidak kesalahan dalam pengutipan data yang berkaitan dengan kredibilitas penulis	a) Ada b) Tidak

	Completeness	Kelengkapan Unsur 5 W+ 1H	5W+1H (what, when, where, who, why, and how)	a) Lengkap b) Tidak lengkap
R E L E V A N C E	Relevansi Sumber berita	Ada atau tidak sumber berita yang relevan dalam mendukung berita		a) Relevan b) Tidak Relevan

Kebenaran sebuah informasi sangat erat kaitannya dengan fakta. Dengan menganalisa teks berita Laporan Utama yang diterbitkan majalah Tempo maka dapat diketahui seberapa dalam fakta yang diungkap oleh wartawan majalah Tempo yang dijadikan dasar sebagai pembuatan berita investigasi. Kedalaman pengungkapan fakta juga akan menjadi bukti bahwa berita yang dihasilkan tidak memuat sebuah pelanggaran faktual. Dengan melakukan penggalan fakta secara cermat maka

wartawan Tempo akan dapat memberikan jawaban jika terdapat satu pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan yang dipublikasikan majalah Tempo.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah analisis teks berdasarkan unit analisis dari kerangka konsep yang ada maka dibuatlah definisi operasional sebagai berikut.. Kerangka konsep dari faktualitas (*factuality*) yang merupakan dimensi kognitif skema objektivitas Westerstahl mencakup *Truth* dan *Relevance* akan menjadi dasar dari operasional dari penelitian ini.

G.1 Truth

Truth memiliki pengertian bahwa sebuah berita yang dihasilkan oleh media harus bersifat faktual. Penilaian tersebut dilakukan melalui fakta-fakta yang tampak dalam teks berita. Untuk mengukur faktualitas sebuah berita bagian ini masih harus diturunkan lagi menjadi tiga bagian yaitu keselarasan dengan kenyataan (*factualness*), akurasi (*accuracy*), dan juga kelengkapan (*completeness*).

G.1.1 Factualness

Keselarasan dengan kenyataan (*Factualness*) dapat diartikan juga sebagai cara untuk melihat ada atau tidaknya pencampuran fakta dengan opini dalam sebuah berita. Cara untuk melihat dimensi ini dalam sebuah berita dapat dilakukan dengan melihat nilai informasi (*information value*), mudah atau tidaknya sebuah berita

dipahami (*readability*), dan juga bisa atau tidaknya fakta-fakta tersebut untuk diperiksa kembali (*checkability*).

G.1.1.1 Nilai Informasi

Semua fakta relevan yang diberikan wartawan sebagai pendukung pokok-pokok pikiran berita dapat diidentifikasi dalam berita yang dimuat pada media massa.. Fakta-fakta itu bisa berupa sebuah pernyataan dari nara sumber dan juga informasi diluar dari inti pemberitaan yang masih bisa dijadikan sebuah latar berita. Kuantitas dari fakta-fakta relevan akan menentukan kedalaman informasi yang dikandung dalam sebuah berita. Semakin banyak fakta-fakta relevan maka semakin banyak juga nilai informasi yang terkandung dalam sebuah berita.

1. Ada kedalaman informasi

Sebuah berita dapat dikatakan memiliki kedalaman informasi jika dalam berita tersebut memuat fakta-fakta relevan yang dapat mendukung pokok-pokok gagasan yang ingin disampaikan oleh wartawan.

2. Tidak ada kedalaman informasi

Sebuah berita yang tidak memiliki kedalaman informasi jika tidak memuat fakta-fakta relevan yang digunakan untuk mendukung pokok-pokok gagasan yang ingin disampaikan oleh wartawan.

G.1.1.2 Readability

Melihat bagaimana fakta yang terkumpul disusun menjadi sebuah alur yang sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami teks berita. Untuk mempermudah sebuah berita mudah untuk dibaca dan dipahami maka penggunaan istilah-istilah khusus yang tidak disertai maknanya sebaiknya dihindari. Hal akan membuat pembaca kebingungan dalam menangkap apa yang sebenarnya menjadi informasi utama dalam sebuah berita yang disampaikan oleh seorang wartawan karena tidak dapat mengartikan kata atau istilah-istilah khusus yang digunakan.

1. Ada istilah khusus

Sebuah berita dikatakan memuat istilah khusus jika didalamnya terdapat kata-kata yang berhubungan dengan topik-topik tema berita. Tema berita itu bisa merupakan bidang politik, ekonomi, pendidikan, atau masalah sosial. Baik disertai dengan makna ataupun tidak untuk menjelaskan arti kata, berita tersebut tetap memuat istilah khusus.

2. Tidak ada istilah khusus

Sebuah berita dikatakan tidak memiliki istilah khusus jika didalamnya tidak memuat kata-kata yang berhubungan dengan topik-topik tema berita. Tema berita bisa berupa bidang politik, ekonomi, pendidikan, ataupun masalah sosial.

G.1.1.3 Checkability

Sumber berita yang jelas merupakan salah satu indikator yang diperlukan dalam menilai faktualitas sebuah berita. Kejelasan tersebut akan mempengaruhi kepercayaan pembaca atas fakta yang ditampilkan. Dengan melihat ada atau tidaknya sumber rujukan yang jelas maka pembaca dapat mengetahui kompetensi dan kredibilitas sumber berita atas topik yang dibicarakan. Cara yang paling sederhana melihat kejelasan sumber berita adalah dengan melihat pencantuman identitas narasumber dalam berita. Dengan pencantuman itu akan memudahkan jika seandainya ada pihak yang ingin mengkonfirmasi pernyataan sumber berita dalam sebuah berita.

Sebaliknya, jika dalam sebuah berita menggunakan sumber yang tidak disebutkan identitasnya atau biasa disebut anonim akan membuat tingkat kepercayaan pembaca menjadi sedikit berkurang. Hal tersebut terjadi karena pembaca akan kesulitan dalam mengidentifikasi kebenaran fakta yang disampaikan karena tidak mengetahui kompetensi dan kredibilitas sumber berita.

1. Ada kejelasan sumber berita

Jika dalam sebuah berita mencantumkan identitas sumber berita secara lengkap. Identitas tersebut bisa berupa nama, profesi, tempat tinggal, jabatan, atau pun umur. Dengan menampilkan identitas sumber berita sesuai dengan kebutuhan berita maka sebuah berita dapat dikategorikan ada kejelasan sumber berita.

2. Tidak ada kejelasan sumber berita

Jika dalam sebuah berita tidak mencantumkan identitas sumber berita secara lengkap (anonim). Identitas tersebut bisa berupa nama, profesi, tempat tinggal, jabatan, atau pun umur. Dengan tidak menampilkan identitas sumber berita maka berita tersebut dikategorikan tidak ada kejelasan sumber berita.

G.1.2 Accuracy

Sebuah informasi yang akurat berarti memiliki pengertian benar sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jika terdapat sedikit saja kesalahan dalam memproduksi sebuah berita akan berakibat juga pada kesalahan pemahaman masyarakat dalam mengartikan maksud dari sebuah berita. Akurasi sebuah berita ini dapat dilihat dari akurasi penyajian berita

Kesalahan-kesalahan sepele dalam penyajian berita seringkali ditemukan dalam penulisan berita. Namun, kesalahan dalam menulis nama, tanggal, hari, salah menulis kata, dan juga penulisan kutipan dapat menjadi sebuah permasalahan yang serius. Hal tersebut berkaitan dengan interpretasi yang akan dilakukan pembaca setelah selesai membaca berita. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ketelitian seorang wartawan dalam melakukan penulisan sebuah berita. Semakin sedikit kesalahan yang dibuat maka semakin akurat yang dihasilkan.

1. Ada kesalahan penulisan

Jika dalam penulisan kata terdapat kesalahan seperti huruf yang kurang dan huruf yang salah letak yang mengakibatkan kesalahan pengejaan. Kalau saja terdapat kesalahan-kesalahan penulisan seperti disebutkan diatas maka berita tersebut dikategorikan terdapat kesalahan.

2. Tidak ada kesalahan penulisan

Jika dalam penulisan kata tidak terdapat kesalahan-kesalahan seperti kurang huruf dan huruf yang salah letak yang dapat menyebabkan kesalahan pengejaan maka sebuah berita dapat dikategorikan tidak ada kesalahan penulisan.

G.1.3 Completeness

Dalam penulisan sebuah berita, prinsip penulisan dengan rumus 5W+1H merupakan sebuah hal yang baku. Dengan kelengkapan enam unsur berita tersebut akan memudahkan pembaca dalam memahami alur dari sebuah peristiwa. Siapa yang menjadi pelaku, peristiwa apa yang terjadi, dimana peristiwa tersebut terjadi, kapan waktu kejadian peristiwa, mengapa terjadi sebuah peristiwa, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi merupakan sesuatu yang harus diketahui pembaca secara utuh agar maksud pokok pikiran berita dapat dibaca dengan baik oleh pembaca. Untuk menjamin kelengkapan data maka analisis akan dilakukan perunsur kelengkapan berita yang dilihat berdasarkan ada atau tidaknya apa, kapan, mengapa, dimana, siapa, dan bagaimana yang ada dalam berita.

1. Ada unsur apa (*what*)

Jika dalam sebuah berita memuat informasi mengenai peristiwa apa yang sedang terjadi.

2. Tidak ada unsur apa (*what*)

Jika dalam berita tidak memuat informasi mengenai peristiwa apa yang sedang terjadi.

1. Ada unsur kapan (*when*)

Jika dalam sebuah berita memuat informasi mengenai waktu kejadian dari sebuah peristiwa.

2. Tidak ada unsur kapan (*when*)

Jika dalam sebuah berita tidak memuat informasi mengenai waktu kejadian sebuah peristiwa.

1. Ada unsur mengapa (*why*)

Jika dalam sebuah berita memuat informasi mengapa sebuah peristiwa bisa terjadi.

2. Tidak ada unsur mengapa (*why*)

Jika dalam sebuah berita tidak memuat informasi sebuah peristiwa bisa terjadi.

1. Ada unsur dimana (*where*)

Jika dalam sebuah berita memuat informasi lokasi tempat kejadian sebuah peristiwa.

2. Tidak ada unsur dimana (*where*)

Jika dalam sebuah berita tidak memuat informasi tempat kejadian sebuah peristiwa.

1. Ada unsur siapa (*who*)

Jika dalam sebuah berita memuat informasi siapa yang menjadi pelaku dari sebuah peristiwa.

2. Tidak ada unsur siapa (*who*)

Jika dalam sebuah berita tidak memuat informasi siapa yang menjadi pelaku dari sebuah peristiwa.

1. Ada unsur bagaimana (*how*)

Jika dalam sebuah berita memuat informasi bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi.

2. Tidak ada unsur bagaimana (*how*)

Jika dalam sebuah berita tidak memuat informasi bagaimana sebuah peristiwa bisa terjadi.

G.2 Relevance

Relevansi berkaitan dengan proses seleksi pemilihan narasumber yang ditampilkan dalam sebuah berita. Proses seleksi pemilihan nara sumber, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang yang dari topik apa yang sedang dibahas

dalam sebuah berita. Dengan melihat latar yang ada pada sumber berita maka dapat diketahui kompetensi yang dimiliki oleh sumber berita.

Dengan cara memeriksa latar belakang sumber beritanya, maka dapat diketahui seberapa relevan sumber berita itu pada topik atau tema yang dibicarakan. Latar belakang ini bisa berupa, pekerjaan, jabatan, atau pun keahlian. Dengan melihat latar belakang itu, dapat dilihat kompetensi seorang sumber berita terhadap suatu topik yang dibicarakan. Semakin kompeten seorang narasumber terhadap pokok bahasan berita maka semakin relevan informasi yang diberikan yang juga mengakibatkan semakin akurat berita yang dihasilkan.

1. Ada relevansi

Jika terdapat hubungan antara sumber berita dengan topik yang sedang dibahas dalam sebuah berita.

2. Tidak ada relevansi

Jika tidak terdapat hubungan antara sumber berita dengan topik yang sedang dibahas dalam sebuah berita.

H. Metodologi Penelitian

H.1 Metode Penelitian

Karena obyek penelitian berbentuk teks berita, maka analisis isi merupakan cara yang paling tepat digunakan untuk menggali data dari apa yang tampak pada teks

berita majalah Tempo. Metode penelitian analisis isi dalam penelitian ini merupakan sebuah metode yang memiliki tujuan untuk menggambarkan karakteristik pesan-pesan dalam ranah publik melalui perantara teks²⁷. Analisis isi sendiri memiliki pengertian sebagai teknik penelitian yang biasa digunakan dalam meneliti suatu hal yang sifatnya obyektif, sistematis dan deskripsi kuantitatif dari isi yang tersirat dalam komunikasi²⁸

Sebenarnya banyak pengertian yang dikemukakan oleh para praktisi mengenai analisis isi, namun dari sekian banyak pengertian yang dikemukakan tersebut analisis ini memiliki prinsip pokok. Prinsip-prinsip pokok yang berlaku umum itu adalah²⁹; pertama adalah prinsip obyektivitas yang memiliki pengertian bahwa penelitian tersebut akan mendapatkan hasil yang sama jika dilakukan oleh orang lain. Kedua, prinsip sistematis. Dengan melakukan sebuah analisis yang sistematis maka konsistensi dalam penentuan kategori yang dibuat mampu mencakup semua isi yang dianalisis agar peneliti yang hanya mnenitik beratkan pada hal yang diminati dan diperhatikan dapat dihindari. Ketiga, prinsip kuantitatif. Penelitian analisis isi akan menghasilkan nilai-nilai yang bersifat bilangan angka untuk melukiskan isi dari sebuah teks atas frekuensi isi tertentu yang dicatat dalam penelitian. Yang terakhir

²⁷ Frey, Lawrence R., Carl H . Botan, Paul G. Friedman, Gary L. Kreps. *Investigating Communication : An Introduction to Research Methods* New Jersey: Prentice Hall. 1991. Halaman 212

²⁸ Krippendorff., Klaus. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Terjemahan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1991.Halaman: 21

²⁹ Kriantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komununikasi :Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* . Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006. Hal: 229

adalah manifest. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah isi yang tampak apa adanya bukan yang dirasa atau dinilai oleh peneliti tetapi apa yang benar-benar terjadi.

Dari metode analisis isi ini maka dapat diketahui faktualitas berita dari majalah Tempo melalui teks berita yang dihasilkan. Semua yang tampak dari hasil analisis teks tersebut juga akan dijadikan pegangan untuk melakukan penilaian ada tidaknya terdapat pelanggaran faktual yang ada dalam Laporan Utama majalah Tempo.

H.2 Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah semua berita yang termasuk dalam rubrik *Laporan Utama* majalah berita mingguan Tempo periode 1 Mei hingga 31 Juli 2010.

H.3 Jenis Data

Menurut sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi³⁰:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari narasumber. Untuk penelitian yang bersifat kualitatif, sumber dari data jenis ini bisa berupa hasil dari sebuah wawancara dan observasi, atau jika penelitian tersebut

³⁰*Ibid.* Hal:41-42.

menggunakan sebuah teks sebagai subyek penelitiannya bukan tidak mungkin data yang diperoleh berasal dari analisis isi dari teks tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua. Yang dimaksud dengan sumber kedua adalah bisa berbentuk buku, hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, artikel, atau bahan dokumentasi lain yang dapat dijadikan pelengkap data primer dalam penelitian.

H.4 Populasi dan Sampel

Pengertian dari populasi adalah seluruh unsur atau elemen yang menjadi anggota dalam suatu kesatuan yang akan diteliti³¹. Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah semua *Laporan Utama* dari majalah berita mingguan Tempo periode 1 Mei 2010 hingga 31 Juli 2010. Pemilihan periode tersebut didasari oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah pada periode ini majalah Tempo memuat beberapa berita yang berkaitan dengan Aburizal Bakrie. Seperti telah dipaparkan pada latar belakang pada akhir tahun 2008 majalah berita mingguan Tempo mendapatkan pengaduan kepada Dewan Pers dari pihak Aburizal Bakrie. Penaduan tersebut merupakan hasil dari dipublikasikannya artikel dalam *Laporan Utama* yang bertema “*Kisruh Saham Keluarga Bakrie*”. Dengan latar belakang tersebut maka menarik untuk dilihat bagaimana majalah Tempo menjaga faktualitas

³¹ Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. LP3S. 1987. Halaman: 152

beritanya sebagai pelaksanaan tugas utamanya dalam memberikan sebuah informasi yang benar kepada masyarakat.

Yang kedua adalah pemberitaan majalah Tempo pada edisi akhir Juni 2010 yang mendapatkan pengaduan dari pihak kepolisian atas *Laporan Utama* yang berjudul “*Rekening Gendut Perwira Polri*”. Pengaduan tersebut terkait dengan data-data yang ditampilkan majalah Tempo pada laporan utama edisi akhir Juni 2010 tersebut. Kedua fakta tersebut menjadi alasan yang cukup kuat untuk menjadikan periode ini dijadikan sebagai populasi dari penelitian penerapan kode etik jurnalistik terkait dengan faktualitas berita ini.

Sampel adalah pengambilan subyek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada³². Teknik sampling digunakan karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, oleh karena itu dipilih beberapa bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian yang dapat mewakili semua populasi penelitian.

H.5 Pengkodingan

Untuk memperoleh data dari teks berita, maka tahap selanjutnya adalah pengkodingan. Pengkodingan dilakukan menggunakan unit analisis yang ada pada definisi operasional. Teknis dari pengkodingan ini akan dilakukan oleh 2 orang yang memiliki ketertarikan dengan topik penelitian ini. Untuk mempermudah

³² Idrus, Muhammad, Dr. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta. UII Press. 2007. Halaman: 121

pengkodean yang akan dilakukan, 2 orang yang melakukan pengkodean akan diberitahukan terlebih dahulu mengenai batasan-batasan operasionalisasi dari unit-unit analisis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan begitu diharapkan banyak kesamaan koding yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Hasil dari pengkodean ini kemudian akan diuji tingkat reliabilitas datanya berdasar kesamaan-kesamaan pengkodean yang dilakukan oleh kedua pengkoder.

H.6 Realibilitas

Analisis teks merupakan sebuah alat pengumpul data yang utama dalam penelitian analisis isi. Oleh karena itu, agar diperoleh data yang obyektif diperlukan sebuah uji reliabilitas. Sebuah tes awal yang dilakukan pada kategori-kategori yang telah disusun pada saat awal penelitian diperlukan untuk meyakinkan bahwa kategori-kategori yang sudah disusun benar-benar teruji untuk melakukan sebuah penelitian.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menguji reliabilitas kategori adalah teknik yang diperkenalkan oleh Ole R. Holsty. Dilakukan dengan cara melakukan pengkodean sampel yang akan diteliti kedalam kategorisasi. Pengkodean dilakukan oleh periset dan satu orang yang ditunjuk sebagai pembanding. Hasil dari pengkodean tersebut dihitung dengan rumus berikut ini³³:

³³ Kriantono, Rachmat. *op. cit.* Halaman 236

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

CR = Coeficient Realibility

M = Jumlah Pertanyaan yang disetujui oleh pengkode

N1 dan N2 = Jumlah Pernyataan yang diberikan oleh pengkode

Data hasil pengkodean dan perhitungan rumus diatas kemudian akan diolah secara kuantitatif dengan mencatat frekuensi kemunculan unit analisis dalam lembar koding. Hasil dari pengkodean tersebut akan diuraikan secara sistematis agar diperoleh sebuah gambaran yang jelas dari hasil analisis teks.

H.7 Analisis Data

Setelah melakukan analisis isi terhadap berita dalam *Laporan Utama* pada majalah Tempo, kemudian dilakukan pengkodean pada temuan-temuan data dari teks berita. Data-data tersebut kemudian diolah untuk dilihat reliabilitasnya jika dilihat dari unit analisis yang digunakan sebagai alat ukur. Semua data hasil analisis teks tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang sudah ada pada kerangka teori. Hasil dari analisis teks yang dihubungkan dengan kerangka teori. Dengan melakukan penghubungan tersebut maka akan dapat diketahui ada atau tidak pelanggaran faktual dalam berita yang diproduksi oleh majalah Tempo.